KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, layakkah?
Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Rencana Pemerintah Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan, Layakkah?

Pemerintah berencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara bertahap pada 2026. Rencana kenaikan itu tertuang dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.

Dalam buku itu, pemerintah menjelaskan dalam kerangka pendanaan perlu ada penyesuaian iuran. Dan penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah.

Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan secara bertahap demi meminimalisir gejolak, sekaligus menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan menambah peserta Penerima Bantauan Iuran (PBI).

Menurutnya, keputusan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan juga diikuti oleh penyesuaian alokasi anggaran untuk PBI dari APBN.

"Waktu keputusan menaikkan tarif BPJS memutuskan PBI dinaikkan artinya dari APBN tapi yang di mandiri ga dinaikkan maka memberikan subsidi sebagian. Dari mandiri itu masih di Rp35 ribu seharusnya Rp42ribu jadi Rp7.000 nya dibayar pemerintah terutama PBPU," ujarnya.

Berapa jumlah kenaikkan iurannya? Sri Mulyani belum mau mengungkap besaran kenaikan iuran BPJS yang akan dilakukan pada tahun depan.

Kata dia pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian iuran akan dibahas oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. "Lembaga itu lah yang diberikan mandat untuk membahas," ujarnya.

Menanggapi rencana itu, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengakui secara resmi Komisi IX belum membahas mengenai rencana kenaikkan tarif BPJS Kesehatan.

Tetapi, dengan situasi keuangan pemerintah yang defisit, menaikkan tarif bisa saja tapi hanya bagi yang mampu.

Sementara, Wakil Presiden Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FARKES) KSPI Bidang Hubungan Antar Lembaga, Dimas P Wardhana menentang keras rencana menaikkan tarif BPJS Kesehatan.

"Kami menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan," tegas Dimas.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Irma Suryani Chaniago dan Dimas P Wardhana mengenai rencana pemerintah menaikkan tarif BPJS Kesehatan secara bertahap di tahun 2026. Berikut wawancaranya.

DIMAS P WARDHANA, Wakil FARKES KSPI Bidang Hubungan Antar Lembaga

Ekonomi Lagi Sulit Bisa Bebani Rakyat



> Pemerintah seharusnya fokus memperbaiki pelayanan dan memastikan pengelolaan BPJS Kesehatan lebih transparan, bukan dengan cara menaikkan iuran.

Rencananya, Iuran BPJS Kesehatan akan naik di tahun 2026. Apa tanggapan Anda?

Kami dari KSPI, khususnya unsur FSP FARKES (Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan) KSPI, menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Apa alasannya?

Kenaikan ini akan semakin membebani pekerja dan masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. Pemerintah seharusnya fokus memperbaiki pelayanan dan memastikan pengelolaan BPJS Kesehatan lebih transparan, bukan dengan cara menaikkan iuran.

Apa yang akan Anda dan teman-teman buruh akan lakukan?

KSPI bersama Jurnkeswatch (salah satu lembaga pemantau jaminan kesehatan yang dibentuk KSPI) akan terus mengawal agar hak pekerja dan rakyat atas jaminan kesehatan tidak dikurangi.

Apakah buruh akan melakukan aksi juga?

Sebelum melakukan aksi, kami akan menggelar dialog dan advokasi kebijakan dengan mengirimkan surat resmi penolakan kepada Presiden, Menteri Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Berikutnya, kami akan melakukan audiensi dengan DPR RI (Komisi IX) untuk mendesak pembatalan rencana kenaikan.

Kami juga akan menggalang opini publik melalui media sosial, pemberitaan, dan edukasi ke masyarakat tentang dampak kenaikan iuran. Serta meluncurkan petisi online untuk memperluas dukungan.

Bagaimana jika upaya tersebut diabaikan pemerintah?

Jika dialog tidak direspons, buruh akan menggelar aksi unjuk rasa nasional di Kantor BPJS Kesehatan Pusat, Kementerian Kesehatan dan Istana Negara. Jadi, aksi adalah pilihan terakhir buruh. ■ REN

IRMA SURYANI CHANIAGO Anggota Komisi IX DPR

Dinaikkan Untuk Kategori Mampu



> Kami meminta kepada BPJS untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemensos terkait data valid orang miskin yang memang harus dicover Penerima Bantuan Iuran.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Kenaikannya secara bertahap. Apa respons dan tanggapan Anda?

Pada dasarnya, di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik (defisit APBN) mau tidak mau untuk penyesuaian layanan bagi peserta yang mandiri (kategori mampu) direncanakan adanya kenaikan.

Bisa Anda dijelaskan kategori mandiri?

Peserta mandiri ini kan ekonominya ada yang sangat mampu, mampu dan setengah mampu.

Kalau yang sangat mampu dan mampu, mungkin tidak ada masalah dengan kenaikan tarif. Bagaimana dengan yang setengah mampu?

Nah, untuk yang setengah mampu ini yang kemungkinan akan ada masalah. Ditambah lagi dengan adanya efisiensi transfer daerah, tentu Pemda akan kesulitan juga untuk membayarkan warganya yang merupakan Pekerja Bukan Penerima Upah atau PBPU BPJS.Ditambah lagi saat ini ada lumayan banyak penerima bantuan iuran yang tiba tiba di non aktifkan tanpa alasan dan pemberitahuan.

Sebagai mitra BPJS. Apa yang ada lakukan?

Kami meminta kepada BPJS untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemensos terkait data valid orang miskin yang memang harus dicover Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Tapi, pada prinsipnya Anda mendukung adanya kenaikkan tarif BPJS atau tidak?

Sampai saat ini, Komisi IX DPR masih belum setuju adanya kenaikkan tarif BPJS.

Kenapa Anda kurang setuju?

Sebetulnya, saya mendapat info ada tambahan anggaran 10 triliun rupiah untuk menyesuaikan kenaikan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan 10 triliun ini infonya untuk dana cadangan. ■ REN